

# FASILITATOR DALAM KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jumrana & Megawati Asrul Tawulo

Dosen Ilmu Komunikasi dan Dosen Sosiologi Universitas Haluoleo Kendari

## ABSTRACT

*This study attempted to describe the methods of communication used facilitators in community development and its role as an agent of development. The method used was a combination method. Data were collected through a survey of the community, and interviews in the facilitator. Research has been conducted in three villages in Kendari are considered successful in community development activities*

*This method of communication conducted in interactions between facilitators and communities in community development activities have contributed to the success of the program despite the rare interactions. Communication through the individuals who play a role in the more intensive group, it is proven effective to disseminate information to members and other community groups through informal communication. Nevertheless, there is a gap between the role played by facilitators and the role of the facilitators is expected by society. People not only want facilitators becomes consultant or mediator, but they expect facilitators can help them solve various problems and facilitate their program proposals to the government. In fact, at this stage, the community has been quite independent in planning and managing community development activities.*

**Keywords:** *Community channel, communication group, empowerment, facilitator*

## Latar Belakang

Pembangunan dalam terminologi Paolo Freire adalah pembebasan. Perspektif ini berasal dari teologi pembebasan yang memprioritaskan individu dan komunal agar bebas dari tekanan, sebagai kunci pemberdayaan dan kepercayaan diri yang menjadi tujuan pembangunan (Melkote and Steeves, 2006). Oleh karena itu pembangunan masyarakat seyogyanya dilaksanakan dengan pendekatan yang

holistik dengan melihat karakteristik dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjadi dampak yang merugikan masyarakat sasaran. Isu-isu penting terkini dalam pembangunan masyarakat adalah penguatan kelembagaan guna meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui saluran komunikasi yang tepat.

Komunikasi bagi pembangunan adalah sebuah desain dan penggunaan yang sistematis dari aktifitas partisipatif, pendekatan komuni-

kasi, metode dan media untuk berbagi informasi dan pengetahuan diantara para pihak dalam sebuah proses pembangunan untuk memastikan saling pengertian dan konsensus yang mengarah pada pelaksanaan kegiatan (Anyaeibunam et.all, 2004). Komunikasi menjadi penting karena keberhasilan dalam setiap tahap pemberdayaan masyarakat bergantung pada pengelolaan metode dan teknik komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat.

Penelitian-penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat terdahulu lebih banyak melakukan kajian dalam aspek kinerja, kelemahan sosial, peningkatan taraf hidup, kepastian hukum, dan pembangunan fisik. Hingga saat ini, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif komunikasi masih kurang diteliti. Penelitian Widarti (2008) misalnya yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, tidak memasukkan indikator komunikasi sebagai faktor penentu. Penelitian-penelitian Amiarta (2005) dan Azis (2005) lebih diarahkan untuk mengkaji pengaruh program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2006, Usuli melakukan penelitian mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat dengan mengkaji proses pembelajaran, sosialisasi, perencanaan partisipatif dan pengembangan kapasitas. Namun penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan pembelajaran dan manajemen sosialisasi. Tidak menyentuh metode pembelajaran dan sosialisasi sehingga permasalahan komunikasi kurang mendapat perhatian.

Studi mengenai jaringan komunikasi dan penguatan kelembagaan terhadap perilaku berdaya masyarakat dilakukan oleh Jumrana (2010). Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jaringan komunikasi informasi pemberdayaan dalam kelembagaan masyarakat dan peran-peran yang terbentuk di dalamnya, serta dialektika komunikasi dalam kelembagaan masyarakat tersebut.

Salah satu peran dalam perspektif komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah *opinion leader*, *opinion leader* dapat berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan formal di suatu daerah, dan juga fasilitator. Dalam menjalankan perannya, seringkali terjadi kesenjangan antara peran yang dilaksanakan *opinion leader* dengan peran yang diharapkan oleh masyarakat (Jumrana, 2011). Lebih lanjut, dikatakan bahwa kesenjangan ini mempengaruhi proses belajar bersama masyarakat dan penerimaan informasi oleh masyarakat.

Metode-metode komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rapat dan pertemuan yang bersifat formal di kelurahan. Sementara penyebaran informasi biasanya melalui diskusi informal dengan kelompok masyarakat, kegiatan arisan warga, dan majelis taklim. Arah komunikasi masih bersifat top down (Jumrana, 2011). Mengingat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara terpadu sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, seharusnya telah terjadi perubahan dalam perilaku komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Akses informasi terbuka dan alternatif teknologi yang digunakan untuk mencari informasi memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Situasi ini seharusnya menjadikan diskusi dengan masyarakat semacam *sharing* pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi tidak lagi bersifat instruktif tapi dialog dan konsultasi. Dialog memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, atau antara masyarakat dan agen pembangunan dalam perencanaan program yang sesuai (Jumrana, 2012). Dialog antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat telah menjadi kajian para ahli (Diaz-Bordenave (1989); Ascroft and Masilela (1989) dalam Melkote and Steeves (2006)).

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk memaparkan hasil penelitian mengenai bentuk interaksi yang digunakan fasilitator dalam komunikasi pemberdayaan masyarakat serta perannya sebagai agen pembangunan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed methods*) untuk mengkaji komunikator dan metode dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan penelitian multi strategi ini menggunakan metode triangulasi yang merupakan suatu perencanaan kegiatan yang akan menjaga peneliti agar bebas dari bias personal yang mengakar dari metodologi tunggal dan dapat mengimbangi fakta-fakta yang tidak memiliki persetujuan umum dalam penelitian (Denzin, 1989). Dengan demikian metode gabungan mencoba menunjukkan secara tepat nilai-nilai suatu fenomena dengan akurat melalui pengamatan dalam sudut pandang metodologi yang berbeda (Henn *et al.*, 2006).

Merujuk pada metode penggabungan dan kebutuhan pengkajian maka penelitian ini cenderung memadukan kedua metode dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengembangkan penelitian kualitatif. Salah satu dari empat skenario penggabungan metode penelitian yang disampaikan Ulin *et al.*, (dalam Tashakkori and Teddlie, (1998)).

Penelitian ini berusaha mengidentifikasi komunikator pembangunan yang diharapkan masyarakat dengan menggunakan metode survei. Alat analisis yang digunakan adalah alat ukur psikologi dengan metode perbandingan pasangan. Menurut Suryabrata (1999), metode ini adalah model skala perangsang untuk mengetahui kecenderungan pilihan responden penelitian. Sementara identifikasi metode dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat analisis domain. Analisis ini digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran riset secara umum atau menganalisis di tingkat permukaan, namun relative utuh tentang objek riset tersebut (Bungin, 2001). Teknik ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai objek riset tanpa harus membuat rincian yang detail mengenai unsur-unsur yang ada pada objek.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei, observasi non partisipan, dan wawancara mendalam di tiga kelurahan di Kota

Kendari, yaitu Kelurahan Anggoeya, Anggalomelai, dan Kambu. Di pilihnya ketiga kelurahan tersebut karena ketiganya merupakan kelurahan-kelurahan yang dianggap berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua; (1) untuk keperluan survei, sampel dipilih secara acak (*random sampling*) terhadap masyarakat yang terlibat dalam kegiatan atau menerima manfaat dari program pemberdayaan masyarakat (2) untuk mengumpulkan data kualitatif, sampel dipilih secara purposif (*purposive sampling*), dalam hal ini informan dalam penelitian adalah para pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat; pemerintah daerah, fasilitator, dan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Sampel yang merupakan responden dalam kegiatan survei di tetapkan sebanyak 150 orang untuk ketiga kelurahan, dengan perincian setiap kelurahan, responden yang ditemui berjumlah 50 orang; Kelurahan Anggaocya 50 responden, Kelurahan Anggalomelai 50 responden, dan Kelurahan Kambu 50 responden. Semua responden ditanya mengenai proses komunikasi yang dilakukan oleh fasilitator dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta persepsi dan harapan terhadap peran yang dilakukan oleh fasilitator sebagai agen pembangunan. Sementara itu, sampel yang merupakan informan dalam penelitian terdiri dari enam fasilitator kelurahan, tiga ketua kelompok masyarakat, tiga kepala kelurahan atau perangkat kelurahan, dan pemerintah kota.

## PEMBAHASAN

### 1. Interaksi Fasilitator dengan Warga dalam Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitator merupakan agen pembangunan yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarah-

kan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir diri dalam kelembagaan masyarakat yang kuat. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, fasilitator bertugas untuk; (1) Menerapkan aturan main dalam daerah dampingan, (2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh petunjuk teknis, (3) Menangani masalah, pelatihan, dan penguatan kelompok. Tugas-tugas tersebut mengharuskan fasilitator untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat.

Bentuk-bentuk interaksi yang dilakukan oleh fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dengan komunikasi tatap muka dan melalui papan informasi yang ditempatkan di kantor kelurahan. Komunikasi tatap muka ini dilakukan secara formal dan informal. Secara formal biasanya dilaksanakan dalam sebuah forum rapat dan sosialisasi umum yang melibatkan perangkat kelurahan dan seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah dampingannya. Komunikasi yang bersifat informal biasanya dilaksanakan melalui saluran komunikasi komunitas, komunikasi kelompok, dan komunikasi antar persona. Interaksi komunikasi yang aktif antara fasilitator dan masyarakat dapat diukur dari intensitas komunikasi tatap muka yang dilakukan dan akses untuk melakukan komunikasi.

Interaksi komunikasi yang aktif antara fasilitator dan masyarakat dapat diketahui dari pengetahuan masyarakat mengenai fasilitator yang bertugas menjadi pendamping di wilayah tempat tinggalnya. Dari survei yang dilakukan pada 150 responden ditemukan bahwa sebagian besar atau 82% responden mengaku pernah bertemu dan menjalin komunikasi dengan fasilitator, baik di dalam rapat dan pertemuan di kelurahan maupun saat berinteraksi dalam pertemuan dengan kelompok swadaya masyarakat. Sementara 8% lainnya tidak tahu dan tidak mengenal fasilitator. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekelompok kecil masyarakat yang tidak pernah berinteraksi dengan fasilitator. Dengan demikian, mereka ini adalah warga masyarakat yang tak pernah

terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Aktifitas komunikasi juga dapat dilihat dari intensitas pertemuan antara warga masyarakat dengan fasilitator. Secara keseluruhan, hasil survei pada tabel 1 menunjukkan intensitas interaksi fasilitator dan masyarakat pada tiga kelurahan. Pada tabel dilihat, warga tiga kelurahan menyatakan bahwa interaksi fasilitator melalui saluran komunikasi jarang dilakukan oleh fasilitator, hal ini disampaikan oleh 48,67% responden dan 21,33% responden mengatakan tidak pernah. Sementara 30% lainnya menyatakan interaksi dengan cara saluran komunitas sering dilaksanakan oleh fasilitator kepada masyarakat.

Pada bagian ini juga, pernyataan responden ketiga kelurahan menunjukkan interaksi fasilitator dengan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat jarang dilakukan. Sebanyak 42,67% diantaranya menyatakan fasilitator jarang berkomunikasi dengan kelompok masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat. Bahkan terdapat 24,67% responden menyatakan tidak pernah. Sebagian responden lainnya, 32,67% menyatakan komunikasi dan interaksi fasilitator sering dilakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Sebagian besar responden atau 42,67% menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengalami berkomunikasi dan melakukan interaksi secara personal dengan fasilitator. 31,33% responden lainnya mengatakan komunikasi personal semacam itu jarang dilakukan. Hanya 26% responden yang mengatakan komunikasi personal antara fasilitator dan masyarakat sering dilakukan.

Di Kelurahan Anggoeya, 47,33% responden menyatakan frekuensi interaksi antara fasilitator dengan masyarakat jarang dilaksanakan. Persentase ini terbilang tinggi dibanding dua kelurahan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa Intensitas komunikasi antara fasilitator dan masyarakat paling rendah di kelurahan ini.

Bentuk interaksi yang dianggap sering dilakukan oleh fasilitator adalah interaksi dengan kelompok, sekitar 26% responden menyatakan hal tersebut, meskipun lebih banyak responden yang menyanggah, dan menyatakan jarang dilaksanakan oleh fasilitator. Interaksi dalam saluran komunitas dan komunikasi personal jarang dilakukan oleh fasilitator di kelurahan ini, bahkan 46% responden mengaku tidak pernah tahu jika fasilitator melakukan komunikasi personal dengan warga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Di Kelurahan Anggalomelai, sebagian besar atau 38,67% responden mengakui bahwa fasilitator jarang melakukan interaksi dengan masyarakat. Bahkan terdapat 27,33% responden menyatakan fasilitator tidak pernah melakukan komunikasi dengan warga. Diantara

tiga bentuk interaksi antara fasilitator dan warga, yang paling sering dilakukan adalah komunikasi kelompok, 40% responden menyatakan hal tersebut. Namun, responden yang mengaku hal itu jarang dilakukan juga tinggi. Selain komunikasi kelompok, menurut responden komunikasi pribadi juga jarang dilakukan oleh fasilitator kepada warga.

Secara umum, di Kelurahan Kambu, interaksi fasilitator dengan warga juga rendah, hal ini ditandai dengan persentase responden yang menyatakan interaksi jarang dilakukan sebesar 36,67%. Bahkan responden yang mengaku tidak tahu sekitar 32,67%. Saluran komunitas lebih sering dilakukan oleh fasilitator dalam berinteraksi dengan warga namun tidak banyak warga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini ditandai dengan ting-

Tabel 1. Intensitas Interaksi Fasilitator dan Warga Masyarakat

Bentuk Interaksi dengan Fasilitator	Frekuensi Interaksi				Jumlah		
	Sering	%	Jarang	%	T.Pernah	%	
<b>Kelurahan Anggoeya</b>							
Saluran komunitas	12	24	27	54	11	22	50
Komunikasi kelompok	13	26	28	56	9	18	50
Komunikasi perorangan	11	22	16	32	23	46	50
Jumlah	36	24	71	47,33	43	28,67	
<b>Kelurahan Anggalomelai</b>							
Saluran komunitas	15	30	16	32	19	38	50
Komunikasi kelompok	20	40	22	44	8	16	50
Komunikasi perorangan	16	32	20	40	14	28	50
Jumlah	51	34	58	38,67	41	27,33	
<b>Kelurahan Kambu</b>							
Saluran komunitas	18	36	30	60	2	4	50
Komunikasi kelompok	16	32	14	28	20	40	50
Komunikasi perorangan	12	24	11	22	27	54	50
Jumlah	46	30,67	55	36,67	49	32,67	
<b>Ketiga Kelurahan</b>							
Saluran komunitas	45	30,00	73	48,67	32	21,33	150
Komunikasi kelompok	49	32,67	64	42,67	37	24,67	150
Komunikasi perorangan	39	26,00	47	31,33	64	42,67	150

Sumber: Analisis data primer tahun 2015

ginya jumlah responden yang menyatakan saluran komunitas jarang dilakukan oleh fasilitator, sekitar 60%. Responden yang menyatakan komunikasi personal tidak pernah dilakukan juga sangat tinggi, yaitu 54%.

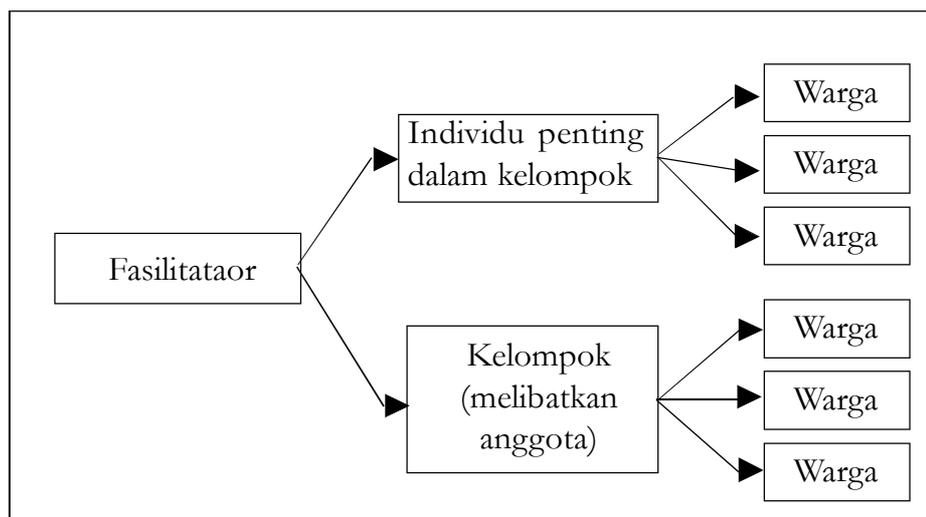
Secara umum, saluran komunitas memang jarang dilakukan. Interaksi dengan cara tersebut biasanya dilakukan pada saat sosialisasi pengenalan program, diseminasi mengenai perencanaan kegiatan dan pada saat evaluasi kegiatan. Dalam situasi yang luar biasa, terdapat permasalahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka saluran komunitas merupakan metode yang paling efektif untuk digunakan (Berdasarkan wawancara penulis dengan Musdamin, seorang fasilitator (14 Juni 2014).

Meskipun Beal dan Bohlen, dalam Cruz (1992) menyebutkan media sangat efektif dalam menanamkan kesadaran, pengetahuan, dan menimbulkan ketertarikan pada proses adopsi dan sumber informasi. Namun pada tingkat lokal, masyarakat di level akar rumput hal tersebut tidak berpengaruh. Faktor kedekatan sumber informasi menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar menerima, mengadopsi, dan melaksanakan sebuah program.

Fasilitator biasanya menggunakan interaksi dalam bentuk komunikasi personal dengan perangkat organisasi di kelurahan dan individu-individu yang memiliki peran penting dalam kelompok-kelompok masyarakat. Kelemahannya adalah, dalam situasi seperti ini tidak semua warga memiliki kesempatan untuk melakukan komunikasi dengan fasilitator. Melalui individu-individu dalam kelompok ini infor-

masi dapat disebar ke seluruh masyarakat. Itulah sebabnya, responden yang menyatakan pertemuan kelompok dan komunikasi personal sering dilakukan oleh fasilitator, teridentifikasi sebagai pengurus lembaga masyarakat atau orang-orang penting dalam kelompok, yang dalam kapasitas tersebut melakukan interaksi secara intensif dengan fasilitator. Sementara responden yang mengatakan tidak tahu, merupakan individu-individu yang mendapatkan informasi dari pengurus kelompok masyarakat atau anggota-anggota kelompok masyarakat lainnya. Alur komunikasi antara fasilitator dengan masyarakat akan nampak seperti diagram berikut:

**Gambar 1. Diagram Alur Penyebaran Informasi dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat**



*(hasil modifikasi penulis berdasarkan analisis data primer, 2015)*

Pada diagram dapat dilihat bahwa fasilitator berkomunikasi secara personal dengan orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap komunitas dan kelompok. Pada bagian lain fasilitator juga berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Alur komunikasinya menunjukkan bahwa orang-orang yang berpengaruh dan anggota kelompok menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Ascroft dan Malilea (dalam Melkote and Steeve, 2006) memetakan bahwa dalam komunikasi penunjang pembangunan, media yang

disarankan untuk digunakan pada masyarakat di level akar rumput diantaranya adalah komunikasi kelompok dan komunikasi antar personal.

Dalam bagian itu pula, Ascroft dan Malilea (dalam Melkote and Steeves, 2006) menyebutkan tujuan penggunaan media tersebut untuk menciptakan iklim saling pengertian antara orang-orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan. Pada kenyataannya, pengaruh penggunaan saluran komunikasi kelompok dan personal lebih dari itu, bahkan mampu meyakinkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang persuasif. Interaksi dengan bentuk komunikasi seperti ini, menyebabkan fasilitator tidak selalu harus bertemu dengan setiap warga masyarakat.

Pertemuan fasilitator dengan masyarakat seharusnya dapat dilakukan 4 kali dalam sebulan karena tugas fasilitator mensyaratkan perlunya komunikasi intensif dengan masyarakat, bukan hanya pengurus kelompok. Namun pada kenyataannya, interaksi jarang terjadi. Dalam sebulan, interaksi hanya terjadi sekali (Berdasarkan wawancara penulis dengan Musdamin, seorang fasilitator (14 Juni 2014)).

Hal tersebut dikarenakan oleh beban kerja fasilitator yang tinggi, selain mendampingi lebih dari satu kelurahan, juga mengerjakan hal-hal yang bersifat administratif. Untuk mensiasati hal tersebut biasanya fasilitator dipilih dari warga yang tinggal di kelurahan tersebut. Beberapa fasilitator tinggal di kelurahan lain, agar komunikasi menjadi lebih mudah maka seringkali komunikasi dilakukan melalui saluran telepon (Berdasarkan wawancara penulis dengan Wahab, seorang fasilitator (29 Juni 2014)).

Nampaknya, bagi masyarakat faktor kedekatan (*proximity*) dan kesamaan (*enclosure*) sangat penting dalam berinteraksi dengan fasilitator. Kedekatan ini dapat berdimensi fisik maupun psikologi. Umumnya fasilitator yang bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan daerah dampungannya lebih mudah untuk di-

terima dan membangun hubungan komunikasi dengan warga. Secara fisik, mudah untuk ditemui dan cepat untuk mendapatkan konfirmasi atas sebuah informasi. Secara psikologis, fasilitator yang tinggal di wilayah dampingan, biasanya mudah diterima karena merupakan anggota masyarakat itu sendiri.

Faktor kesamaan memungkinkan fasilitator memahami kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Hal ini tentu saja memudahkan dalam proses komunikasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Fasilitator yang memiliki kesamaan dengan masyarakat setempat dapat melakukan pendekatan komunikasi yang sesuai.

Terminologi *proximity* dan *enclosure* dalam komunikasi ini lebih sering digunakan dalam proses persepsi terhadap orang lain dan diri sendiri (baca Devito, 2000). Dalam proses memahami orang lain, persepsi positif akan mengarahkan pada penerimaan terhadap orang lain. Dalam konteks inilah kedua prinsip tersebut dapat digunakan dalam menguraikan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap fasilitator.

## 2. Peran Fasilitator dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pendekatan *Bottom up*, menurut Bordinave (1989) orang-orang dibujuk untuk mengambil bagian di dalam aktivitas mandiri, tetapi penyelesaian permasalahan lokal yang mendasar dipilih oleh agen pembangunan eksternal. Partisipasi orang-orang diarahkan. Padahal sasaran partisipasi tidak hanya bersifat pragmatis tapi juga lebih kepada kemandirian masyarakat. Keberadaan fasilitator sebagai agen pembangunan di satu sisi memberi kontribusi positif dalam membina dan berbagai pengetahuan dengan masyarakat, namun di sisi lain hal ini membuat masyarakat menjadi bergantung pada fasilitator.

Dalam melaksanakan tugasnya, fasilitator memiliki sejumlah peran pada saat bekerja di masyarakat. Seringkali peran yang

dilakukan tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk mengidentifikasi peran-peran yang dimainkan fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan survei pra penelitian kepada responden. Hasil survei mengidentifikasi beberapa peran yang dianggap sering dilakukan oleh fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) Menyampaikan semua informasi yang lengkap dan jelas mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat, (2) Mendorong dan memotivasi untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, (3) Memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, (4) Menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, (5) Menghubungkan masyarakat dengan lembaga keuangan, ko-

operasi dan bank, (6) Membantu mencari solusi permasalahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, (7) Memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat, dan (8) Membantu membimbing dan melatih masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Untuk membandingkan antara peran yang dilaksanakan (*the played role*) dan peran yang diharapkan (*expectation role*), maka dilakukan survei lanjutan. Survei dilakukan dengan meminta semua responden, yang berjumlah 150 orang untuk memilih peran yang dianggap paling sering dilakukan oleh fasilitator dan peran yang paling diharapkan sering dilakukan oleh fasilitator.

Dari delapan peran yang dimainkan oleh fasilitator tersebut kemudian dirangking dan dipilih lima peran yang paling sering dilakukan. Demikian juga, pada peran fasilitator

Tabel 2. Matriks Popularitas Perangsang Untuk Peran Fasilitator

	Tk. Popularitas	Peran	Keterangan
The Role Played	1	Mendorong dan memotivasi untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan	Motivasi
	2	Memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat	Fasilitasi
	3	Menyampaikan semua informasi yang lengkap dan jelas	Komunikasi
	4	Memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Konsultasi
	5	Menghubungkan masyarakat dengan pemerintah	Mediasi
Expected Role	1	Memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Konsultasi
	2	Membantu mencari solusi permasalahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pemberi solusi
	3	Membantu membimbing dan melatih masyarakat	Asistensi
	4	Memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat	Fasilitasi
	5	Menghubungkan masyarakat dengan pemerintah	Mediasi

Sumber: Analisis data primer tahun 2015

yang diharapkan, kedelapan peran yang diharapkan oleh masyarakat dirangking, kemudian dipilih lima peran yang paling diharapkan. Masing-masing kelima peran fasilitator tersebut, baik yang dilakukan dan yang diharapkan kemudian disajikan dalam bentuk matriks popularitas perangsang, seperti pada **tabel 2**.

Pada tabel 2 nampak bahwa beberapa peran yang dianggap sering dilakukan oleh fasilitator tidak terdapat pada peran-peran yang diharapkan oleh masyarakat. demikian juga sebaliknya, ada peran-peran yang diharapkan oleh masyarakat, namun tidak dilakukan oleh fasilitator.

Pada bagian peran yang dilakukan oleh fasilitator, terdapat tiga peran yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu fasilitasi, konsultasi, dan mediasi. Sementara peran-peran seperti memotivasi dan komunikasi yang sering dilakukan oleh fasilitator kurang mendapat apresiasi dan perhatian dari warga. Peran-peran seperti menjadi pemberi solusi dan asistensi, menurut responden adalah dua peran yang seringkali tidak dilakukan oleh fasilitator. Padahal dua peran tersebut seringkali dibutuhkan oleh masyarakat.

Kelima peran - baik pada peran yang dilakukan fasilitator maupun peran fasilitator yang diharapkan masyarakat - disebut sebagai perangsang. Masing-masing, kelima peran lalu dipasang-pasangkan. Setiap perangsang dipasang dengan keempat perangsang lainnya. Banyaknya pasangan perangsang di hitung dengan rumus:

$$\sum P = \frac{1}{2} k (k-1)$$

jika k = 5 maka jumlah pasangan perangsang adalah:

$$P = \frac{1}{2} \times 5 (5-1)$$

$$\sum = 10$$

Pasangan-pasangan inilah yang menjadi perangkat perhitungan skala berpasangan. Setelah data ditemukan, maka frekuensi pilihan dihitung dan dibuatkan tabel seperti pada **tabel 3**.

Pada tabel 3 ditemukan Z score tertinggi untuk peran yang dilakukan oleh fasilitator adalah peran mediasi yaitu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Lalu berturut-turut adalah memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (konsultasi), menyampaikan semua informasi yang lengkap dan jelas (komunikator), mendorong dan memotivasi untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan (motivasi), dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat (fasilitasi).

Tabel 3. Matriks Kerja Perbandingan Pasangan (N=150)

		Peran 1	Peran 2	Peran 3	Peran 4	Peran 5
<b>The Role Played</b>	<b>Peran 1</b>	75	62	74	77	89
	<b>Peran 1</b>	88	75	80	85	70
	<b>Peran 1</b>	76	70	75	74	78
	<b>Peran 1</b>	73	65	76	75	75
	<b>Peran 1</b>	61	80	72	75	75
	<b>∑f</b>	373	352	377	386	387
	<b>P</b>	0,497	0,469	0,503	0,515	0,516
	<b>Z</b>	-0,008	-0,078	0,008	0,038	0,04
	<b>Zc</b>	0,07	0	0,086	0,116	0,118
		Peran 1	Peran2	Peran 3	Peran 4	Peran 5
<b>Expected Role</b>	<b>Peran 1</b>	75	74	58	89	47
	<b>Peran 1</b>	76	75	53	63	45
	<b>Peran 1</b>	92	97	75	80	56
	<b>Peran 1</b>	61	87	70	75	42
	<b>Peran 1</b>	103	105	94	108	75
	<b>∑f</b>	407	438	350	415	265
	<b>P</b>	0,543	0,584	0,467	0,553	0,353
	<b>Z</b>	0,108	0,212	-0,083	0,133	-0,377
	<b>Zc</b>	0,485	0,589	0,294	0,510	0

Sumber Analisis data primer tahun 2015

Dengan demikian, ditemukan bahwa fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih sering berperan untuk melakukan mediasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Artinya, berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berusaha untuk disampaikan kepada pemerintah agar dapat terealisasi. Disamping peran tersebut, fasilitator cenderung lebih sering menempatkan diri sebagai tempat konsultasi masyarakat dalam berbagai hal terkait pemberdayaan masyarakat. Hal ini berbeda dengan perhitungan analisis Z score untuk peran yang diharapkan masyarakat dapat dilakukan oleh fasilitator. Pada bagian peran yang diharapkan terlihat bahwa peran sebagai pemecah masalah atau pemberi solusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki score tertinggi. Selanjutnya berturut-turut adalah memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat, memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (konsultasi), membantu membimbing dan melatih masyarakat (Asistensi), dan Menghubungkan masyarakat dengan pemerintah (Mediasi).

Hasil ini menggambarkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan fasilitator dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu dapat memfasilitasi berbagai usulan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga berbagai hasil rapat dan pertemuan yang dihasilkan dapat terealisasi.

Dengan membandingkan antara peran yang dimainkan oleh fasilitator dan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh fasilitator ditemukan *gap*, ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan kenyataan di lapangan. Selama ini peran fasilitator yang dirasakan oleh masyarakat cenderung hanya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, dan sebagai konsultan yang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masya-

rakat. Sementara harapan masyarakat adalah fasilitator dapat menjadi *problem solver* yang membantu menyelesaikan masalah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi berbagai usulan kegiatan agar dapat diterima dan dilaksanakan.

Walaupun diharapkan oleh masyarakat, menjadi *problem solver*, mungkin sebaiknya tidak dilakukan fasilitator dalam jangka waktu yang panjang. Peran ini hanya dapat dilakukan dalam rangka *affirmative* yang bersifat sementara. Ke depan masyarakatlah yang harus dilatih untuk menjadi *decision maker* dan *problem solver* agar dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Fasilitator sebaiknya dapat menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap keberadaannya. Ascroft and Malilea menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, warga masyarakat aktif dalam program dan proses pembangunan, mereka memberikan kontribusi gagasan, mengambil inisiatif, menyatakan kebutuhan dan permasalahannya, dan menegaskan otonominya (Melkote dan Steeves, 2006). Dengan presisi tersebut, maka kerangka *Bottom up* sebagaimana yang disarankan oleh Diaz-Bordenave (1989), belum menjadi model ideal dari komunikasi pemberdayaan masyarakat. Kurangnya dialog antara fasilitator dengan masyarakat menjadikan hubungan keduanya menjadi timpang.

Peran agen pembangunan adalah membantu masyarakat dengan menjadi fasilitator. Dialektika antara keduanya muncul disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pengetahuan dan penampilan antara fasilitator, masyarakat dan pemimpin lokal. Hal ini dapat dipecahkan dengan dua cara menurut Fals-Borda, (1991), yaitu (1) komitmen pelaksanaan dari fasilitator eksternal pada tujuan bentuk perubahan sosial. Ini dapat dicapai bila cara-cara yang diperkenalkan fasilitator diadopsi oleh masyarakat, (2) Penolakan atas hubungan asimetris antara fasilitator dari luar dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kepekaan, perenungan dan sikap rendah hati fasilitator karena hal ini tidaklah gampang. Pada akhirnya

proses ini akan menghasilkan kegiatan yang *partisipatori endogeneous*, dimana masyarakat lokal melaksanakan program yang dipilih sesuai dengan kebutuhannya, dengan metode-metodenya sendiri dalam memecahkan persoalan yang bersifat lokal.

Oleh karena itu, pendekatan saluran komunikasi, baik saluran komunitas, komunikasi kelompok, dan komunikasi antar persona digunakan untuk menghasilkan dialog antara fasilitator dengan masyarakat, antara masyarakat itu sendiri. Dialog membantu masyarakat untuk saling memahami satu sama lain dan mengidentifikasi permasalahan mereka secara kolektif. Mengambil keputusan terkait pemilihan prioritas kebutuhan dan pelaksanaan, serta penyelesaian masalah dengan cara mengembangkan fungsi komunikasi, yaitu mengembangkan anggota kelompok dan masyarakat untuk turut serta mengubah kondisi mereka. Dialog mendorong masyarakat untuk terlibat sebagai partisipan aktif dalam komunikasi pemberdayaan masyarakat.

## KESIMPULAN

Intensitas interaksi antara fasilitator dengan masyarakat secara langsung jarang dilakukan, baik melalui saluran komunitas, komunikasi kelompok, dan komunikasi antar persona. Intensitas komunikasi yang tinggi justru dilakukan dengan individu-individu tertentu dalam kelompok yang mampu melakukan diseminasi informasi kepada anggota kelompok lainnya dan masyarakat luas. Dalam situasi komunikasi antar persona seperti ini terjadi dialog, komunikasi dua arah antara fasilitator dan individu-individu dalam kelompok sebagai wakil masyarakat. Meskipun pertemuan jarang dilaksanakan, namun bentuk interaksi semacam ini cukup efektif. Masyarakat menerima setiap informasi yang disampaikan oleh fasilitator melalui individu-individu tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, fasilitator telah mulai mengurangi intervensinya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat sudah semakin mandiri. Namun ter-

dapat kesan bahwa masyarakat masih bergantung pada fasilitator. Hal ini ditandai dengan harapan masyarakat yang menginginkan fasilitator dapat menjadi problem solver. Masyarakat masih belum cukup percaya diri untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan bersama. Termasuk dalam hal fasilitasi usulan program dan kegiatan. Meskipun pada kenyataannya masyarakat telah berada pada tahap yang mulai mandiri dalam merencanakan dan mengelola program dan kegiatan. Ada perbedaan antara fasilitator dan masyarakat dalam mengartikulasikan peran fasilitator pada tahap ini. ■

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiarta, Dady Sudrajat (2005) *Dampak Proyek Penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) terhadap pendapatan penerima bantuan (Studi kasus di Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan) 2000-2003*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
- Azis, Abdul (2005) *Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap pendapatan masyarakat (Studi kasus di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan) 2004*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
- Diaz-Bordenave, Juan (1989) "Participative Communication as a Part of the Building of participative Society", Paper prepared of the Seminar Participation: A Key Concept in Communication for Change and Development, Pune-India.
- Bungin, Burhan (2001) *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press

- Crus, Frederico A. (1992) *Adoption and Diffusion of Agricultural Innovation*. in Jaime B. Valera, Vicente A. Martinez, and Ramiro F. Plopino (eds) In An Introduction to Extension Delivery Systems Manila: Island Publishing House Inc. pp 97-127
- Denzin, Norman (1989) *The Research Art: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 3rd edition. New York: McGraw-Hill
- Devito, Joseph A. (1997) *Komunikasi Antar Manusia: Kuliah Dasar*. Edisi Ke-5. Jakarta: Professional Books
- Falz Borda O (1991). *Some Basic Ingredients*. In O. Fals Borda and M.A. Rahman (eds.) *Action and Knowledge: Breaking of Monopoly with Participatory Action Research*. New York: Apex Press. Pp 3-12
- Henn, M., Weinstein, M., and Foard, N. (2006) *A. Short Introduction to Social Research*. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publication
- Jumrana (2011) *Jaringan Komunikasi dalam Program PMU P2KP pada BKM Wonua Morini Kota Kendari*. Jurnal Komunikasi Profetik. Vol. 04/ No. 01/ April 2011 hal: 1-15
- Jumrana (2012) *Penguatan Dimensi Komunikasi untuk Perubahan Sosial dalam Desain Perencanaan Pembangunan*. Jurnal Komunikasi Stimuli. Edisi III, Jan-Jun. 2012 hal: 1-16
- Melkote, Srinivas R. and Leslie H. Steeves (2006) *Communication for Development in The Third World: Theory and Practice for Empowerment* 2<sup>nd</sup> edition, 8<sup>th</sup> printing. New Delhi: Sage Publication. London: Thousands Oaks
- Singarimbun, Masri (1996) *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryabrata, S. (1999) *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Tashakkori, Abbas and Charles Teddlie (1998) *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Applied Social Research Methods Series*. London: Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publication
- Usuli, Agussalim (2006) *Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Implementasi P2KP pada Desa Pentadio Timur dan Desa Dunu di Kabupaten Gorontalo)*. Makassar: Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tidak dipublikasikan
- Widarti, Surati Rini (2008) *Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Peran BKM dalam Pelaksanaan P2KP dan PNPM di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)* Yogyakarta: Tesis Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada